

KELAS PEKERJA DAN PENDEKATAN LINTAS PEMBILAHAN (*CROSS-CLEAVAGE APPROACH*): STUDI KASUS PERJUANGAN GERAKAN SOSDEM DI SKANDINAVIA

Cherry Augusta

Abstract

The Scandinavian social democrat's ability in managing societal cleavages of politics has been an important part in their relative success of promoting the ideas of social democracy, and welfare state. But there are revived and contested arguments about what kind of cleavages that mostly played significant role and strategically has been managed to pave the way for democratization, and also what kind of approaches used in managing them. Through this paper I comparatively and definitely emphasize the struggle of working class and social democrats in Scandinavia. In which social democrats play highly important role in organizing the working class. As apparent in the course of Scandinavia's democratic history, the working class as democratic potential raised significantly when it being organized and enfranchised. Furthermore, the class met typical contexts in capitalism development and traditional cleavages of Scandinavia. The cross-cleavages approaches definitely most used in the struggle, particularly throughout coalition with another class, territorial and cultural groups, gender, and even religious groups.

Key Word: Social Democrat, Societal Cleavage, Organized Working Class, Croos-Cutting Cleavages, Cross-Cleavages Approaches

Pendahuluan

Sangat jelas bahwa kemampuan kaum Sosialis Demokrat (Sosdem) di Skandinavia dalam memanage pembilahan-pembilahan masyarakat (*societal cleavages*) dalam politik merupakan bagian penting dari kesuksesan relatif mereka untuk mempromosikan gagasan sosial demokrasi dan negara kesejahteraan. Terdapat sejumlah argumen yang berkontestasi mengenai jenis pembilahan (*cleavage*) apa yang paling memainkan peran signifikan dan strategis dalam melapangkan jalan bagi demokratisasi, serta pendekatan apa yang digunakan untuk *memanage* pembilahan tersebut. Dengan demikian, penting bagi kita untuk meninjau ulang peranan kelas pekerja dan bagaimana kaum sosdem memanage pembilahan kelas sosial dalam proses demokratik berbasis sejarah sosial demokrasi di Skandinavia

Ruth Berins Collier, secara kritis berpendapat bahwa, peranan kelas pekerja dalam demokratisasi merupakan hal yang kontroversial dan sering diperdebatkan.

Pertanyaannya terutama berkenaan dengan apakah rejim demokratik merupakan hasil dari kemenangan dari bawah, yang mensubordinasi atau mengeksklusi kelompok-kelompok yang merebut kekuasaan elit yang keberatan (terhadap demokrasi), atau sebuah penaklukan dari atas? (lihat Collier, 1999: 1). Negara-negara Skandinavia memiliki karakter pembilahan masyarakat yang istimewa, itu bersifat positif atau negatif bagi gerakan sosdem, tergantung pada bagaimana kaum sosdem memanaganya. Pembilahan yang paling mendominasi di Skandinavia sangat kompleks, meliputi kelas sosial-ekonomi, agama, budaya, territorial, dan jender. Stein Rokkan (1967) menekankan geografi, agama, dan kelas sosial sebagai pembilahan utama, sementara Oddbjorn Knutsen (1998) menekankan kelas sosial, sektor pekerjaan, dan gender sebagai pembilahan politik.

Pembilahan-pembilahan tersebut, tentulah tidak fix, karena terdapat dinamika melalui berbagai transformasi bentuk, pola, dan karakter akan berbeda dalam ruang dan waktu. Dinamika itu sangat menentukan

jalan dari proses demokratisasi. Ia dapat menjadi potensi tetapi dapat juga menjadi ancaman bagi proses tersebut. Skandinavia memiliki sejarah panjang dalam hal tersebut sehingga mengalami beragam konflik dan kompromi antar pembilahan. Dan dengan cara demikian kaum sosdem Skandinavia relatif sukses memanaganya dalam pertarungan politik. Sejumlah isu terkait pembilahan masyarakat memunculkan beragam debat dan konflik politik mengenai praktek kebudayaan, kebijakan sosial, hubungan antara *center-periphery*, dan lain-lain. Struktur dan formasinya terkonstruksi melalui periode sejarah yang berlangsung lama.

Memanage pembilahan tersebut, kaum sosdem menggunakan berbagai strategi, pendekatan dan institusi, mencakup: pengorganisasian kelas pekerja, pengaturan kesejahteraan, pelembagaan solidaritas sosial, mempromosikan kesatuan yang didasarkan pada kesadaran kelas, dan nilai-nilai dasar welfarisme. Memanage pembilahan tersebut tentu bukanlah hal yang sederhana, terdapat dilemma dan tantangan, disamping memang juga ada kesempatan di dalamnya. Namun, hasilnya berupa kesuksesan relatif yang telah menurunkan konflik etnis, bahasa, dan agama, yang kemudian menjadi lebih tersatukan dalam konflik kelas. Gerakan sosdem mempelajari strategi memanage pembilahan masyarakat dari pola-pola yang relatif konsisten pada dukungan dan isu-isu elektoral yang berbasis pada pembilahan tersebut di berbagai periode dan wilayah. Dalam politik elektoral, terdapat pola dukungan politik terhadap kaum sosdem dan para pesaingnya berdasarkan pada kecenderungan dan karakter pembilahan masyarakat. Pola tersebut sangat dipengaruhi oleh sifat pembilahan, serta jenis strategi yang digunakan dalam upaya meraih 'simpati' rakyat.

Artikel ini akan menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana kaum sosdem memanage kelas pekerja dan pembilahan berdasarkan kelas dalam politik

membangun negara kesejahteraan, dan apakah ia memiliki signifikansi dalam keberlangsungan negara-negara kesejahteraan di Skandinavia? Pertama, saya akan secara komparatif dan kritis mengulas struktur kelas Skandinavia. Kedua, saya akan secara komparatif mengeksplorasi asal-usul dan dinamika dari masing-masing kelas di Skandinavia. Terakhir, saya akan menelusuri strategi dalam memanage *social-class cleavages* melalui *cross-cleavage approach*.

Struktur, Konflik dan Transformasi

Dalam hal keterhubungan (*linkage*) antara kelas sosial dan negara kesejahteraan (*welfare state*), terdapat beberapa perdebatan dan argumen mengenai struktur kelas di Skandinavia, mencakup mengenai homogenitas atau heterogenitas, dan bagaimana ia dipengaruhi serta mempengaruhi sifat negara kesejahteraan Skandinavia.

Norwegia lebih homogen dalam hal etnisitas dan agama serta struktur kelas nya lebih egaliter dibandingkan dengan sebagian besar bangsa Eropa lainnya, homogenitas merupakan sebuah ide yang terkonstruksi secara sosial dan digunakan dalam proses *nation building* (Gullestad, 2001). Kelas pekerja bersifat heterogen dan secara sosial terfragmentasi dari segi geografi, budaya, keahlian, dan lain-lain. Solidaritas dan kesatuan merupakan produk dari perjuangan dan pengorganisasian gerakan buruh (Bjornson, 1990). perhatian terhadap petani dan partai merupakan hal utama dalam politik dan kepentingan-kepentingan krusial dalam pembangunan karakter universal negara kesejahteraan Skandinavia (Halvorsen dan Stjerno, 2008: 50). Posisi petani (*peasant*), kemudian pekerja relatif kuat, dan kelas atas posisinya tidak begitu kuat, hal ini menciptakan keseimbangan; kelas-kelas populer tidak tersubjekkan secara penuh. Kondisi ini menciptakan budaya politik tersendiri (Kjeldstadli, 2007: 60). Mobilisasi kelas pekerja selama bertahun-tahun sesudah pengenalan hak pilih menghasilkan konflik jenis baru, tetapi tidak

terdapat polarisasi sepanjang dimensi sosial tertentu: poros pusat-pinggiran yang lama memotong poros kelas-atas baru dan menghasilkan sistem aliansi yang semakin kompleks (Rokkan, 1966: 78-79).

Industrialisasi dan urbanisasi memiliki pengaruh sangat menentukan dalam transformasi struktur kelas maupun konstelasi politik. Naiknya kategori-kategori strata-menengah baru, membentuk perubahan dalam struktur kelas masyarakat (Andersen, 1988: 29). Perolehan luar biasa yang dicapai oleh kaum sosdem sejak tahun 1910 sebagian hanya bisa dipahami melalui perubahan dalam komposisi pemilih selama proses industrialisasi dan urbanisasi; perolehan tersebut harus dikaitkan dengan peningkatan mobilisasi pada masing-masing stratum: pada kelas pekerja industri dan pada kaum proletar pedesaan serta kelas-menengah perkotaan (Rokkan, 1967: 427). Hasilnya berupa sistem konstelasi kepartaian yang menuju polarisasi kelas, tetapi tidak melalui kekuatan sama di seluruh kawasan, dan kutub konflik kelas tidak sama antara pedesaan dan perkotaan (Rokkan, 1966: 79).

Jarak ideologis tentu mendorong percepatan runtuhnya teori kelas. Gagasan masyarakat yang ditentukan oleh kelas mungkin terlihat berakhir. Tetapi ia memiliki relevansi pada masa sebelumnya. Pada tahun 1950-an, tesis berakhirnya ideologi berpendapat bahwa perjuangan kelas terhentikan oleh kemakmuran kelas pekerja, ia hanya diikuti oleh label militansi dan konflik yang ekstrim pada tahun 1960-an. Sekarang, batu loncatan lama dari teori kelas, kelas pekerja industri, sedang berada dalam keruntuhan drastis. Erosi struktur kelas tradisional Skandinavia berkaitan dengan kemunculan masyarakat pasca industri (Andersen, 1993: 7).

Divisi dan Dinamika Kelas Sosial

Kelas sosial dan ekonomi adalah pembilahan yang paling dominan dan memainkan perannya dalam proses demokratik di Skandinavia. Pembilahan

politik yang paling penting adalah kelas sosial, atau berbagai bentuk pembagian pekerjaan secara hirarkis. Posisi dalam pasar kerja atau struktur hirarkis berbagai posisi merupakan pembilahan politik utama (Knutsen, 1998: 1). Kelas sosial-ekonomi yang terpenting adalah kelas pekerja dan para pesaingnya: yaitu elit. Di posisi tengah dan paling memainkan peran penting adalah kelas-menengah. Negara kesejahteraan merupakan rumah bagi semua kelas, sementara kaum sosdem berada pada posisi mengupayakan kesejahteraan bagi semua kelas, merupakan alat untuk mengintegrasikan kelas pekerja di dalam masyarakat (Hagtvet dan Rudeng, 1984: 240).

1. Kelas Rendah (*Lower*) dan Pekerja.

Mengenai hubungan antara kelas dan proses demokratisasi, kelas pekerja merupakan aktor prinsipil. Kelas pekerja yang terorganisir muncul sebagai aktor kunci dalam pembangunan demokrasi (lihat Collier, 1999: 10-11). Di Eropa, kelas pekerja seringkali memerlukan kelas-menengah sebagai teman agar sukses dalam mendorong demokrasi (Collier, 1999: 12). Pada pengalaman demokrasi di Norwegia, pendirian rezim demokratik terjadi antara tahun 1814 hingga 1898, reformasi utama yang membentuk prosesnya yaitu dinamika kompetisi partai dan mobilisasi elektoral, kelas pekerja muncul di tahap akhir (Collier, 1999: 66). Jadi, kelas pekerja adalah aktor terpenting yang pengaruhnya akan signifikan jika diorganisir, kekuatan dari kelas bawah dikondisikan melalui emansipasi dan hak pilih. Walaupun kelas pekerja kuat dan terorganisir, diperlukan koalisi dengan kelas lain dalam perjuangan kelas.

Memperhatikan pembangunan dan struktur institusi serta organisasi yang terkait dengan pasar kerja, kita sangat perlu memahami keseragaman dan perbedaan di antaranya. Sejumlah faktor: historis, geografis, dan ekonomi

berkontribusi terhadap keseragaman. Ada upaya serius menuju kerjasama di antara para pekerja, pada tahap awal, *Scandinavian Worker's Congresses*, didirikan pada tahun 1886, dengan peran penting, dan sejumlah serikat didirikan di seluruh Skandinavia. Semua serikat masuk ke dalam kesepakatan yang memiliki signifikansi hingga saat ini (Allardt et al., 1981: 308-309)

Setelah arus deras industrialisasi diikuti oleh transformasi kondisi kerja ekstrim, kelas pekerja Norwegia semakin terorganisir dan teraspirasikan, pencapaian dan perjuangan mereka menghasilkan kondisi dan pernghargaan yang lebih baik serta diperkuat secara politik oleh mereka sendiri dan Partai Buruh. Mereka juga memerlukan kapabilitas dalam memmanage isu-isu yang bertentangan pada pertemuan silang-pembilahan (*crosscutting cleavage*), antara lain territorial dan kebudayaan. Sementara di Swedia, kita harus mempertimbangkan dampak dari hubungan industrial dan kebijakan upah yang solidaristik. Unionisasi tidak terlalu tinggi (sekitar 85 persen), tetapi serikat juga spesifik didasarkan pada kelas. Distribusi penghargaan kerja sering ditentukan melalui negosiasi yang tersentralisasi, antara federasi pekerja dan serikat nasional (Andersen, 1993:105).

Arus industrialisasi yang deras menciptakan kelas pekerja yang lebih luas dan lebih militan. Para pekerja yang terorganisir menuntut kondisi hidup yang lebih baik dan reformasi-reformasi sosial. Dukungan elektoral terhadap Partai Buruh meningkat, tumbuh dengan cepat pada dekade pertama abad ke-20. *Trade union movement/LO* sukses dengan diorganisir dan dimobilisasi oleh Partai Buruh, dan sejumlah aksi mogok dilakukan untuk meningkatkan upah, yang menghasilkan perbaikan kondisi kerja. Sebuah partai komunis didirikan pada tahun 1923 tetapi tidak menjadi

ancaman substansial bagi Partai Buruh dalam persaingan memperebutkan suara kelas pekerja (Halvorsen and Stjerno, 2008: 13). Kapitalisme industrial menghasilkan gerakan buruh yang kuat pada akhir dekade abad ke-19, yang dulu berkarakter radikal dan revolusioner. Mayoritas Partai Buruh Norwegia memilih untuk bergabung dengan Komunisme Internasional selama beberapa tahun sebelum 1920-an. Krisis ekonomi yang panjang, pengangguran dan hutang, selama antara masa perang kemudian telah mengubah hal itu, sejak awal 1930-an mereka mendukung program reformis Keynesian dalam upaya menggerakkan roda perekonomian (Kjeldstadli, 2007: 11). Tidak hanya di daerah pinggiran yang terisolasi tetapi bahkan di area-area urbanisasi dan industrialisasi awal: oposisi territorial terhadap pengaruh kota menjadi lebih kuat, ketimbang kontras antara kaum pemilih lama dan para pemilih baru dari kelas rendah, Partai Buruh merasa sangat sulit untuk memperoleh dukungan dari luar kelompok inti pekerja industri yang (Rokkan dan Valen, 1964, Rokkan, 1966: 80)

Sebelum terjadinya kesetaraan hubungan gender, terdapat kesenjangan gender yang signifikan, kesadaran kelas dan *bargaining power* yang rendah pada kaum perempuan di Skandinavia. Menguatnya kesadaran kelas dan posisi tawar perempuan mempengaruhi struktur kelas pekerja secara positif, kelas pekerja mendapatkan keuntungan dan kekuatan dari partisipasi perempuan yang besar dalam *trade union* dan pergerakan buruh sosdem, akibat partisipasi perempuan yang besar dalam pekerjaan. Selama dua decade, para perempuan di sebagian besar Negara-Negara Barat berubah menjadi lebih radikal (Knutsen, 1998: 5). Sebelumnya, "Banyak perempuan dari kelas pekerja yang telah berpindah ke posisi-posisi privat yang berpenghasilan cenderung mengalami ketidakpastian

mengenai politik, mereka gamang memilih di antara dua posisi yang berlawanan” (Rokkan, 1967: 434).

2. Kelas-menengah (*Middle Class*)

Dalam term konsepsi kelas, kelas-menengah merupakan strata elit dan sering dianggap sebagai lawan dari kelas pekerja, tapi pada bagian tengah dan tipe moderat terdapat konteks sosial dan ekonomi tertentu dibalik kemunculan dan pertumbuhannya. Strata elit terdiri dari kelas yang memiliki tanah atau “kelas atau sektor menengah”: sebagian besar sektor urban (borjuis, borjuis-kecil profesional, manajerial, dan kerah putih), sebagai hasil dari sebaran industrialisasi, komersialisasi, dan pertumbuhan kapitalis (Collier, 1999: 17). Dalam hal hubungan antara status sosial dan orientasi politik yang diharapkan/ekspektasi umum dalam hubungan dengan ideologi politik: kelas-menengah dan yang memiliki pekerjaan dalam status sosial tinggi akan memberikan suara kepada partai non-sosialis, sementara kelas pekerja dan pihak yang berada pada posisi status sosial rendah akan memiliki orientasi yang lebih radikal dan akan memberikan suara kepada partai-partai sosial (Knutsen, 1998: 2).

Menurut Rokkan, “Di Norwegia, pertarungan yang krusial untuk menguasai parlemen, semakin berbentuk perebutan suara kelas-menengah dari kalangan *salaried employees*, teknisi, dan personil administratif. Stratum ini di antara kelas pekerja industrial dan kelas-menengah lama mempunyai posisi yang stabil dalam hitungan bobotnya dan menjadi sepertiga dari penduduk. Tidak ada satupun partai yang mampu menancapkan klaim eksklusif terhadap mereka (Rokkan, 1966: 94-95). Teori lain menekankan orientasi yang lebih radikal mengenai kelas-menengah baru: pendukung Politik Baru (*New Politics*) yang berpendapat bahwa segmen kelas-

menengah baru akan memiliki nilai-nilai post-materialist baru dan memberikan suara kepada aliran politik hijau atau partai kiri-libertarian. Sesuai dengan polarisasi kelompok tersebut, terdapat hipotesis di dalam teori Politik Baru (*new Politics theory*): munculnya poros baru dari polarisasi kelompok, erat terkait dengan munculnya dimensi materialist/post-materialist sebagai pembilahan kepartaian (Inglehart 1984: 32-33; 1997: 248-252; Knutsen, 1998: 3).

Di Amerika Latin, ”dibandingkan dengan Eropa, kelas pekerja urbannya kurang memainkan peran yang mengemuka sebagai kekuatan pro-demokratik. Kekuatan yang menggerakkan dibalik pembentukan awal demokrasi di Amerika Latin, yaitu kelas-menengah. Di Eropa, kelas pekerjanya seringkali memerlukan kelas-menengah sebagai mitra untuk berhasil mendorong demokrasi, sementara di Amerika Latin terdapat beberapa cara lain (Rueschemeyer et al. dalam Collier, 1999: 11). Maka, strata menengah memainkan peran penting ketika borjuis kecil menghilang dan kelas pekerja tradisional mengalami stagnan (Andersen, 1988: 30). Kepentingan yang positif dan instan dikembangkan dalam reformasi kebijakan sosial oleh kelas-menengah. Sejak 1930-an Swedia telah merasakan aura tersebut, hal ini merupakan petanda evolusi sosial (Baldwin, 1990: 134). Di Norwegia, Partai Buruh bisa mengantisipasi pertumbuhan kelas-menengah baru, dan dengan sukses menciptakan basis politik. Ketika kelas-menengah baru terbentuk, sebagian sebagai hasil dari ekspansi negara kesejahteraan, Partai buruh mampu bersaing dengan Partai Liberal dan Partai Konservatif. Persaingan ini menghasilkan konsensus politik yang lebih luas, juga dalam area kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) (Halvorsen dan Stjerno, 2008: 19).

Pertanyaan selanjutnya: apakah hubungan antara dampak negara kesejahteraan dan pertumbuhan kelas-menengah dalam hal stratifikasi sosial di Norwegia dan Swedia? Efek keseluruhan stratifikasi sosial merupakan kombinasi yang kompleks: negara kesejahteraan mengurangi kekuatan numerik proletariat, fordist dan post-industrial, melalui kebijakan pensiun dini, yang mendorong pertumbuhan kelas-menengah melalui meningkatnya kalangan profesional, semi-profesional dan pekerjaan jasa yang padat karya, sehingga menurunkan nilai penting relatif kelas proletariat manual, kecenderungan tatanan stratifikasional menuju kelas-menengah (Kolberg dan Kolstad dalam Andersen, 1993: 58-59, 76). Pemberian hak-hak tertentu kepada kelas bawah mengakibatkan perubahan dramatis yang besar dalam politik Norwegia. Kota dan pusat industri merupakan kawasan yang pertama kali mengalami polarisasi antara strata menengah dan strata bawah, tetapi pergeseran tersebut perlahan menyebar ke komunitas rural tradisional dan ke daerah pesisir (Rokkan, 1966: 81).

Kelas pekerja yang terorganisir secara politik dan strategis telah membuat koalisi kelas dengan kelas-menengah dalam perjuangan kelas, dan sebagaimana kelas pekerja, kelas-menengah perlu diorganisir juga, terdapat pertarungan yang ketat antara partai-partai politik untuk memperebutkan suara mereka. Di Norwegia, kelas-menengah baru muncul sebagai kekuatan politik sesudah partai-partai mengorganisir mereka dengan diposisikan berada pada kelompok inti pendukungnya serta juga terpecah, baik dalam hal asal-usul sosio-ekonomi maupun loyalitas politik. Stratum baru itu menjadi target utama propaganda partai dalam upaya mendapatkan suara tambahan, hal ini mengakibatkan konvergensi garis kebijakan dan

penghalusan oposisi ideologis. Kelas-menengah yang baru, membagi suaranya kepada Buruh, Liberal, Kristen, dan Konservatif tetapi pada saat bersamaan mereka menghasilkan pengaruh menyatukan (Rokkan, 1966: 95).

3. Kelas Atas (*Upper Class*)

Kelompok kelas atas merupakan bagian dari strata elit dan berada pada posisi yang paling sering berlawanan dengan kelas bawah. Dalam hal hubungan antara kelompok itu dengan demokratisasi, di antara berbagai kasus dalam sejarah, dua dari pola demokratisasi yang ada dibentuk oleh tujuan dan strategi strata elit, menengah dan kelompok-kelompok kelas atas (Collier, 1999: 33), kelompok yang relatif kecil namun dominan, mencakup para pemilik kekayaan terbesar dan pemegang kendali industrialisme kapitalis. Elemen utama kontinuitas berada pada konsentrasi utama kuasa ekonomi, organisasional, dan politik pada kelas 'atas' yang hanya meliputi sekelompok minoritas penduduk (Crompton, 1993: 191-192).

Di Denmark, demokrasi terutama didorong oleh koalisi borjuis-pedesaan yang meminta digantinya monarki absolut dengan pemerintahan konstitusional (Collier, 1999: 36). Sementara di Norwegia, dekade pertama abad ke-20 ditandai dengan transformasi besar dalam masyarakat. Tidak seperti Swedia, Norwegia tidak memiliki kelas atas industrial dan finansial yang kuat, akibatnya investor asing memainkan peranan yang lebih signifikan dalam pembangunan industri besar (Stratch, 2001 dalam Halvorsen dan Stejerno, 2008: 13). Mengenai sejarah kapitalisme di Norwegia, kapitalisme merkantilis pada abad ke-17-19, dijalankan oleh peningkatan borjuis. Walaupun para petani (*peasants*) juga mencoba mengeksplor, mereka tidak memiliki modal dan jaringan pasar untuk dapat

bersaing dalam waktu yang panjang. Borjuis ini direkrut dari luar negeri: Denmark dan Jerman Sebelah Utara, Orang Jerman dari kota-kota Hansa, Belanda dan Skotlandia. Perlahan mereka menjadi warganegara, kemudian menjadi borjuis Norwegia (Kjeldstadli, 2007: 9).

Pendekatan Lintas Pembilahan (*Cross-Cleavages Approach*): Strategi, Dilema Dan Tantangan

Terlihat bahwa kesuksesan relatif kaum sosdem di Skandinavia dipengaruhi dan dihasilkan melalui sejumlah strategi, khususnya melalui pengorganisasian kelas pekerja dan membuat koalisi dengan kelas lainnya, strategi ini relatif sukses dalam menurunkan konflik pembilahan lainnya dan menyatukan seluruh pembilahan ke dalam perjuangan kelas untuk pembangunan negara kesejahteraan. Institusionalisasi solidaritas sosial termasuk di dalam strategi-strategi tersebut. Tentu, sejumlah faktor dan konteks juga termasuk di dalamnya, strategi-strategi tersebut saja memang tidak cukup, tapi sangat menentukan.

Partai Sosial-Demokratik dan basis-basis politiknya dari kelas pekerja yang terorganisir memainkan peran prinsipil dalam mengambil keuntungan dari keunggulan elektoral (*electoral advantage*). Pergerakan ke dalam kelas pekerja mengakibatkan pergeseran generasi terbesar dalam kesetiaan politik, yang merupakan gambaran lain perubahan dasar menuju peningkatan keseragaman dukungan partai dalam stratum ini. Menurut Rokan, pergerakan ke dalam kelas-menengah memiliki hasil yang lebih beragam: Sosialis yang menjadi anggota serikat buruh regular kurang memiliki kecenderungan untuk memberikan suara kepada Sosialis jika ia merupakan anggota dari serikat kelas-menengah yang berlawanan atau tidak diorganisir sama sekali” (Rokan, 67: 433).

Model Negara kesejahteraan Skandinavia bisa dianggap sebagai upaya untuk memodifikasi, bahkan menghapuskan

mekanisme pasar ketika berhubungan dengan kategori rakyat dan kebutuhan tertentu. Ia merupakan hasil mobilisasi politik kelas pekerja, humanisasi atau “penjinakan” kapitalisme, atau juga sebagai proteksi terhadap bahaya inheren dalam sistem pasar yang mengatur dirinya sendiri (Hagtvet and Rudeng, 1984: 236). Tradisi berkuasanya kekuatan Kiri dalam waktu yang lama, telah menyuburkan tendensi untuk berasosiasi, dengan kalangan Sosdem yang mengikutinya. Negara-Negara Kesejahteraan datang dengan hasil yang baik (Baldwin, 1990: 59). Pembilahan politik berdasarkan pembagian antara kiri politik dan kanan politik, tampak kuat di Swedia, dan cukup kecil di Norwegia. Denmark menunjukkan pola yang sama dengan yang terjadi di Swedia, serta Finlandia berada di antara Denmark dan Norwegia. Kemudian, pola di Norwegia kurang lebih bersifat ‘konsensual’ ketimbang yang di Swedia dan Denmark (Kautto et al., 1999: 254). Dalam konteks kepentingan politik elektoral dan mobilisasi massa, pembilahan politik tersebut saling-bergantung dengan titik-silang antar pembilahan, karena semua pihak menggunakan pendekatan lintas-pembilahan.

Institusionalisasi solidaritas sosial sangat berarti dalam pendekatan lintas-pembilahan sosial dalam demokrasi sosial, dalam memperjuangkannya, pendekatan lintas pembilahan seringkali digunakan dalam menghadapi titik silang antar *cleavages*. Peranan istimewa kelas dan pembilahan yang terkait dengan kelas, dalam hubungannya dengan kebijakan kesejahteraan, dilengkapi bahkan digantikan oleh gender sebagai pembilahan struktural lain dalam kapitalisme kontemporer. Dasar dari argumen ini, pertama, perempuan lebih bergantung pada negara kesejahteraan, baik sebagai pekerja, anggota keluarga yang terbebas dari pekerjaan mengasuh yang berat dan tak digaji, serta sebagai penerima keuntungan/tunjangan dari negara. Kedua, pengalaman khusus perempuan dapat membuat perempuan lebih cenderung menggunakan ‘rasionalitas dalam mengasuh,

dimana perhatian, pertimbangan dan dedikasi lebih diutamakan (Kautto et al., 1999: 251).

Penutup

Kaum sosdem memainkan peran yang amat penting dalam mengorganisir kelas pekerja. Sebagaimana terlihat pada perjalanan sejarah demokrasi di Skandinavia, kelas pekerja sebagai potensi bagi demokrasi muncul secara signifikan ketika ia diorganisir dan diberi hak tertentu. Lebih lanjut, kelas tersebut menemui konteks-konteks tipikal dalam perkembangan kapitalisme serta *cleavage* tradisional di Skandinavia. Penting untuk menekankan bahwa kelas pekerja dan kaum sosdem ini tidaklah mudah dalam memanage konteks dan titik silang-pembilahan (*cross-cutting cleavages*) tersebut. Pendekatan-pendekatan lintas pembilahan (*cross-cleavages approaches*) secara jelas merupakan yang paling sering digunakan dalam perjuangan mereka, antara lain melalui koalisi dengan kelas lainnya, kelompok-kelompok teritorial, dan budaya, gender, serta bahkan kelompok-kelompok religius. Karena konteks tersebut tidaklah bersifat *fix*, perkembangan dan dinamika belakangan ini tentu memerlukan modifikasi dan adaptasi yang diperlukan dalam pendekatan-pendekatan tersebut. Dalam isu-isu kontemporer, globalisasi yang diikuti oleh transnasionalisme, misalnya, diikuti oleh imigrasi massal, membuat pendekatan-pendekatan tersebut harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana Negara-Negara Skandinavia menemukan kembali nasionalisme mereka serta akankah pendekatan lintas-pembilahan (*cross-cleavages approach*) relevan bagi integrasi. Saya menyadari bahwa segala sesuatu tidak secara mutlak ditentukan oleh faktor yang tunggal atau sejumlah kecil faktor saja, bagaimanapun, dari eksplorasi di atas, saya dengan mudah menyimpulkan bahwa pendekatan lintas pembilahan tersebut merupakan yang paling relevan bagi masa depan Skandinavia.

Daftar Pustaka

- Allardt Erik, et al. 1981. *Nordic Democracy: Ideas, Issues, and Institutions in Politics, Economy, Education, Social, and Cultural Affairs of Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden*. Copenhagen: Det Danske Selskab.
- Andersen, Gosta Esping. 1988. *Social Foundations of Postindustrial Economies*. Oxford: Oxford University Press.
- Andersen, Gosta Esping. 1993. *Changing Classes: Stratification and Mobility in Post-Industrial Societies*. London: Sage Publications.
- Baldwin, Peter. 1990. *The Politics of Social Solidarity: Class Bases of The European Welfare State 1875-1975*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collier, Ruth Berins. 1999. *Path Toward Democracy: The Working Class and Elites in Western Europe and South America*. New York: Cambridge University Press.
- Crompton, Rosemary. 1993. *Class and Stratification: An introduction to Current Debates*. Cambridge: Polity Press.
- Hagtvet, Bernt and Rudeng, Erik. 1984. "Skandinavia: Achievements, Dilemmas, Challenges", in *Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Nordic Voices*. American Academy of Arts and Sciences.
- Halvorsen, Knut and Stjerno, Steinar. 2008. *From Poverty to A Welfare State, in Work, Oil and Welfare: The Welfare State in Norway*. Universitetsforlaget.
- Kautto, Mikko et al. 1999. *Nordic Social Policy: Changing Welfare States*. New York: Routledge.

- Kjeldstadli, Knut. 2007. Norwegian History, in Conference of European Association for International Education in Trondheim, September 12-15 2007.
- Knutsen, Oddbjorn. 1998. Social Class, Sector Employment and Gender as Political Cleavages in Skandinavian Countries: A Comparative Longitudinal Study 1970-95. Oslo: Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Oslo.
- Rokkan, Stein. 1966. Norway: Numerical Democracy and Corporate Pluralism, in Dahl, Robert A. Political Oppositions in Western Democracies. Yale: Yale University Press.
- Rokkan, Stein. 1967. Geography, Religion, and Social Class: Crosscutting Cleavages in Norwegian Politics, in Lipset, S.M. and Rokkan, S. Party System and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. The Free Press.